

Gubernur Sultra Tinjau Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Wakatobi

Wakatobi, Sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Patuno, Kabupaten Wakatobi, Kamis (12/03/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Sulawesi Tenggara berjalan sesuai rencana serta tidak mengalami kendala dalam proses pembangunannya.

Berdasarkan laporan di lapangan, hingga saat ini progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Patuno telah mencapai 6,1 persen, yang meliputi pekerjaan tahap awal konstruksi serta persiapan struktur bangunan.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat distribusi barang, layanan usaha, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sultra disambut oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Koperasi, pendamping koperasi, hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih setempat.

ASR sapaan akrab Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa pembangunan gedung koperasi ini dikerjakan oleh PT Agrinas dengan melibatkan unsur TNI serta masyarakat dalam pengawasan proses pembangunan.

Ia berharap seluruh masyarakat Desa Patuno dapat menjadi anggota koperasi agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang disediakan.

“Jadi nanti masyarakat bukan hanya mendapatkan akses barang dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Termasuk program SPPG yang seharusnya mengambil bahan baku dari koperasi, sementara koperasi membelinya dari nelayan maupun petani setempat,” ujarnya.

Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan rantai ekonomi desa yang lebih kuat, karena hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap melalui koperasi.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Gerai KDMP di Desa Patuno menjadi salah satu pembangunan awal yang terealisasi di Kabupaten Wakatobi dan diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan koperasi desa di Sulawesi Tenggara.

Untuk diketahui, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih dapat dilaksanakan apabila tersedia lahan yang memenuhi spesifikasi ukuran serta memiliki legalitas yang jelas sesuai ketentuan program pemerintah.

Pewarta: Samidin

Jelang Idul Fitri, Bulog Raha Pastikan Stok Beras Aman dan Cukup hingga 3 Bulan ke Depan

MUNA, Sultranet.com - Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Raha memastikan ketersediaan stok beras tercukupi menjelang perayaan Idul Fitri mendatang.

Kepala Bulog Raha, Muthain, menyampaikan hal tersebut saat di temui sejumlah awak media di kantornya, pada Jumat (13/03/2026).

“Terkait stok beras jelang Idul Fitri, alhamdulillah kondisinya aman dan cukup untuk kebutuhan 3 bulan ke depan dengan jumlah sebanyak 656 ton 445 kilogram,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir terkait ketersediaan beras. Selain stok yang sudah tersedia, tambahan stok juga sedang dalam perjalanan ke Raha.

“Stok beras yang dalam perjalanan saat ini sebanyak 500 ton, sehingga total stok yang akan tersedia menjadi 1.156 ton 445 kilogram,” pungkas Muthain.

Penulis : Borju

Pemkab Bombana Buka Seleksi Terbuka Jabatan Sekda, PNS Se-Sultra Dipersilakan Mendaftar

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana. Pembukaan seleksi ini diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan birokrasi secara transparan, profesional, dan sesuai dengan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, Rabu (11/3/2026).

Pengumuman seleksi terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara sehat dalam rangka mengisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. Proses penjangkaran ini tidak hanya diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga terbuka bagi PNS dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam pengumuman Panitia Seleksi disebutkan bahwa jabatan yang dibuka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.a. Posisi ini memiliki peran strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah karena bertanggung jawab dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi, mengintegrasikan pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif dan terarah.

Pembukaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, objektivitas, serta profesionalisme dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Melalui mekanisme seleksi terbuka, diharapkan dapat terpilih figur birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi yang ditanda tangani Ketua Tim Drs. Asrun Lio, M.Hum., P.Hd menjelaskan, proses seleksi akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk menilai kemampuan dan kualitas peserta secara menyeluruh. Tahap awal dimulai dengan seleksi administrasi guna memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan peserta.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan penilaian kompetensi atau assessment untuk mengukur kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kapasitas strategis dalam memimpin organisasi pemerintahan.

Selain itu, peserta juga akan mengikuti tahapan penulisan makalah yang berisi gagasan dan strategi terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan panitia seleksi dan dilanjutkan dengan sesi wawancara untuk menggali lebih dalam visi, komitmen, serta integritas calon pejabat pimpinan tinggi.

Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam manajemen aparatur sipil negara.

Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV, serta memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b.

Selain itu, peserta juga harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas

yang relevan paling singkat lima tahun serta pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator maupun jabatan fungsional ahli madya sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta juga harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, serta moralitas yang baik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Persyaratan lainnya mencakup penilaian kinerja yang baik dalam dua tahun terakhir serta memenuhi batas usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan seleksi jabatan pimpinan tinggi.

Panitia Seleksi juga menyebutkan bahwa proses seleksi terbuka ini dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi yang mengatur manajemen aparatur sipil negara serta pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Melalui seleksi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh figur Sekretaris Daerah yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial yang kuat, tetapi juga mampu memperkuat koordinasi birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana.

Pengumuman resmi Panitia Seleksi juga memuat informasi lengkap mengenai jadwal tahapan seleksi, persyaratan administrasi, serta tata cara pendaftaran bagi para calon peserta.

Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti proses seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan ini, diharapkan dapat terpilih sosok Sekretaris Daerah yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Link lengkap pengumuman dibawah ini:

[PENGUMUMAN JPTP \(1\)](#)

Sumber: ppid diskominfo bombana

Ramadhan Berbagi : Kejari Muna Bagi Sembako Ke TPA dan Periksa Kesehatan Anak Panti

MUNA, Sultranet. Com - Kejaksaan Negeri Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), bekerja sama dengan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, menggelar kegiatan bakti sosial dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Pada hari Rabu (11/3/2026), korps Adhyaksa membagikan paket sembako kepada karyawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertugas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Motewe. Kegiatan ini dilakukan dengan didampingi Kepala DLH Muna, LM Yakob.

Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Indra Thimoty, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan bentuk kepedulian antar sesama.

“Kami memilih TPA dan panti asuhan sebagai sasaran agar bantuan tepat guna. Saya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda rutin kejaksaan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga paket yang diberikan bisa bermanfaat,” ujarnya.

Setelah dari TPA, pihak kejari melanjutkan kegiatan ke Panti Asuhan Baitur Rahman yang berada di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu. Selain pembagian sembako, juga didatangkan dokter kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para anak-anak di panti.

Kepala panti mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Alhamdulillah, bantuan yang diberikan sudah sangat cukup. Semoga menjadi berkah,” ucapnya.

Penulis : Borju

Cahaya Kebersamaan di Puskesmas Ladiana, Kunci Pelayanan Optimal Menuju Wawonii Timur Laut Sehat dan Wawonii Emas Berkelanjutan

Wawonii Timur Laut, sultranet.com - Saat azan maghrib berkumandang di langit Kecamatan Wawonii Timur Laut, suasana di Puskesmas Ladiana tidak hanya dipenuhi dengan suara doa dan syukur setelah seharian berpuasa, tetapi juga dengan tawa hangat dan interaksi akrab antara petugas dan staf.

Bulan suci Ramadhan tahun ini membawa nuansa istimewa bagi seluruh jajaran puskesmas Ladiana, di mana kebersamaan bukan sekadar kata-kata, melainkan terwujud dalam setiap langkah pelayanan.

Dibawah Kepemimpinan Kepala Puskesmas (Kapus) Ladiana, Endang Fitriyani Malaiji, S.ST., M.KM, momentum Ramadhan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan visi “Wawonii Timur Laut yang Sehat” menuju “Wawonii Emas dan Berkelanjutan” Senin (09/03/2026)

Bulan suci ini adalah momen emas untuk mempererat tali silaturahmi antar staf, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan. “Ramadhan mengajarkan bagi para jajaran Pegawai Puskesmas Ladiana tentang keikhlasa dalam ruang pengabdian.

Di Puskesmas Ladiana, tidak memandang jabatan atau peran masing-masing. Dokter, perawat, tenaga farmasi, staf administrasi, dan lainnya swemua adalah tim yang berjuang bersama untuk kesehatan masyarakat Wawonii Timur Laut.

“Ketika kita saling mendukung, beban kerja terasa lebih ringan, dan semangat untuk melayani pun semakin membara,” ujar Endang melalui telepon selulernya.

Sebagai Nahkoda, Kehadiran Endang tidak hanya bisa memberikan arahan, tetapi juga menjadi teladan nyata. Ia selalu hadir memastikan setiap detail pelayanan berjalan lancar.

Tidak hanya dalam hal interaksi sosial, di bawah kepemimpinannya, kebersamaan juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas layanan medis.

Ia selalu menekankan pentingnya sinergi antar divisi, sehingga seluruh tim bekerja sama dengan luar biasa untuk memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan terbaik.

Tim medis berkoordinasi erat dengan tim administrasi untuk mempercepat proses pendaftaran dan registrasi pasien, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama.

Tim farmasi pun bekerja ekstra keras atas arahnya untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, terutama yang sering dibutuhkan.

Selain pelayanan rutin, di bawah kepemimpinan Endang Fitriyani Malaiji, Puskesmas Ladianta juga kerap menggelar kegiatan edukasi kesehatan terhadap masyarakat.

Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ladianta tidak terlepas dari visi besar pembangunan daerah.

“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan. Jika masyarakat Wawonii Timur Laut sehat, maka produktivitas mereka akan meningkat, dan ini akan menjadi modal berharga untuk mencapai Wawonii Emas yang Berkelanjutan. Ramadhan tahun ini menjadi bukti bahwa dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Endang dengan tegas.

Dengan semangat kebersamaan yang semakin membara di bawah kepemimpinan Endang Fitriyani Malaiji, S.ST., M.KM, Puskesmas Ladianta berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Mereka berharap, momentum Ramadhan ini tidak hanya menjadi momen sesaat, tetapi juga menjadi awal dari terjalinnya kerja sama dan solidaritas yang abadi di antara seluruh jajaran, serta menjadi langkah nyata menuju visi Wawonii Timur Laut Sehat dan Wawonii Emas yang Berkelanjutan.

“Kami ingin Puskesmas Ladianta menjadi tempat yang nyaman dan terpercaya

bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kebersamaan yang kita bangun adalah harta yang paling berharga dan kunci untuk mencapai kemajuan daerah,” tutup Endang Fitriyani Malaiji dengan penuh harap.

Pewarta: Aldi Darmawan

Hamlin Gaspol Benahi Kinerja DPMD Bombana

BOMBANA, sultranet.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., langsung gerak cepat (Gaspol) usai dipercaya Bupati untuk jadi pelaksana tugas kepala dinas yang mengurus urusan desa di wonua Bombana tersebut.

Pada rapat internal evaluasi program kerja di Aula DPMD Bombana. Rabu (25/2/2026), Hamlin menekankan bahwa rapat tersebut harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar rapat rutin, tetapi menjadi forum strategis untuk membedah secara rinci setiap program dan kegiatan melalui matriks rasionalisasi anggaran. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam arahnya, Hamlin menegaskan bahwa seluruh jajaran DPMD Bombana harus bekerja lebih disiplin, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan desa.

“Evaluasi ini penting agar setiap bidang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Semua program harus berjalan terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Hamlin

Salah satu fokus utama yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah percepatan penyelesaian regulasi desa. DPMD Bombana diminta untuk terus memperkuat pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, pengaturan teknis tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta Pergantian Antar Waktu (PAW) juga menjadi perhatian penting guna memastikan proses pemerintahan desa berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hamlin juga menekankan pentingnya penataan administrasi aparatur desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Di sektor pemberdayaan masyarakat, DPMD Bombana terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa.

Melalui pendampingan yang intensif, BUMDes diharapkan dapat memiliki badan hukum yang jelas serta mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Selain BUMDes, pengembangan program One Village One Product (OVOP) juga menjadi prioritas penting. Program ini mendorong setiap desa untuk memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal.

“Potensi desa harus kita dorong agar bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat. Melalui OVOP, setiap desa diharapkan mampu mengembangkan produk unggulan yang memiliki nilai jual,” jelas Hamlin.

Dalam rapat tersebut juga dibahas program strategis daerah yakni “1 OPD 1 Hektar”. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi internal organisasi, Hamlin juga mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan nyaman. Ia meminta seluruh pegawai untuk mematuhi jadwal kerja, menjaga kebersihan

kantor, serta memperkuat budaya kerja yang profesional.

Selain itu, penguatan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial dinas juga menjadi perhatian penting. Menurut Hamlin, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan dinas kepada masyarakat secara terbuka.

“Publik harus tahu apa yang kita kerjakan. Karena itu, media sosial dinas harus dimanfaatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi program dan kegiatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membangun suasana kerja yang religius dan harmonis, termasuk melaksanakan salat berjamaah tepat waktu sebagai bagian dari pembinaan moral dan spiritual di lingkungan kerja.

Melalui rapat evaluasi ini, DPMD Bombana berkomitmen memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan kualitas pendampingan kepada pemerintah desa.

Hamlin berharap seluruh jajaran DPMD Bombana dapat bekerja lebih solid, inovatif, dan profesional dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

“Pada akhirnya, tujuan dari semua program ini adalah memastikan desa-desa di Bombana semakin maju, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya. (IS)

**Yudi Utama Arsyad Perjuangkan
Perbaikan Tanggul Sungai Desa
Biru, BWS Janji Kerja Usai**

Lebaran

Bombana, sultranet.com - Anggota legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), membawa langsung aspirasi masyarakat Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari terkait kondisi tanggul Sungai Poleang yang rusak dan membutuhkan penanganan segera. Selasa (3/3/2026)

Langkah itu dilakukan menyusul kekhawatiran warga terhadap tanggul sungai di wilayah Desa Biru yang roboh dan tergerus arus. Saat debit air meningkat, terutama pada musim hujan, ratusan hektare lahan persawahan terancam terendam banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen.

Dalam kunjungannya ke kantor BWS di Kendari, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana tersebut diterima langsung oleh Bidang Operasional. Dalam pertemuan itu, pihak BWS menyampaikan bahwa perbaikan tanggul Sungai Poleang di Desa Biru diperkirakan akan mulai dikerjakan setelah Lebaran melalui dukungan biaya operasional Balai Wilayah Sungai.

“Alhamdulillah aspirasi masyarakat Desa Biru direspons dengan baik. Insya Allah setelah Lebaran akan mulai dikerjakan melalui anggaran operasional BWS,” ujar Yudi Utama Arsyad usai pertemuan.

Ia menjelaskan, kondisi tanggul yang roboh saat ini sangat mengkhawatirkan. Setiap kali hujan deras dan debit Sungai Poleang meningkat, air meluap ke area persawahan warga. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Menurutnya, Desa Biru merupakan salah satu sentra pertanian di Kecamatan Poleang Timur. Ratusan hektare sawah yang dikelola petani menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Karena itu, perbaikan tanggul menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau air naik dan tanggul tidak mampu menahan arus, maka sawah-sawah warga terendam. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut nasib petani dan keberlangsungan produksi pangan,” tegasnya.

Yudi menambahkan, sebagai wakil rakyat, dirinya berkewajiban memperjuangkan

aspirasi masyarakat hingga ke tingkat provinsi maupun pusat jika diperlukan. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari petani Desa Biru yang khawatir akan ancaman banjir saat musim penghujan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Balai Wilayah Sungai yang telah merespons cepat laporan dan aspirasi warga. Ia berharap komitmen yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan sesuai rencana.

“Kami sangat mengapresiasi BWS yang terbuka dan responsif. Harapan kami, pekerjaan ini benar-benar bisa terlaksana setelah Lebaran agar masyarakat tidak lagi dihantui kekhawatiran setiap kali hujan turun,” katanya.

Lebih jauh, Yudi menegaskan bahwa penguatan tanggul Sungai Poleang bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya mitigasi bencana banjir di wilayah tersebut. Ia berharap ke depan ada perencanaan yang lebih komprehensif untuk pengelolaan sungai agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Masyarakat Desa Biru pun kini menaruh harapan besar terhadap realisasi perbaikan tersebut. Mereka berharap pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai dapat segera menurunkan tim teknis untuk melakukan penanganan sehingga aktivitas pertanian kembali aman dan produktif. (IS)

Ramadhan 1447 H, Masjid Jabal Nur Jadi Tonggak Sejarah Baru Desa Lamoluo

Konkep, sultranet.com - Ramadhan 1447 Hijriah menjadi momentum bersejarah bagi Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Untuk pertama kalinya sejak resmi mekar pada 2008, warga desa tersebut dapat menunaikan salat tarawih di masjid yang dibangun di tanah

mereka sendiri, yakni Masjid Jabal Nur.

Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, masjid itu telah difungsikan sejak malam pertama Ramadhan. Suasana haru dan bahagia menyelimuti warga. Takbir menggema dari dalam desa, anak-anak berjalan membawa sajadah, sementara para orang tua menatap bangunan itu dengan penuh rasa syukur.

Masjid Jabal Nur berdiri atas inisiatif dan kepemimpinan Kepala Desa Lamoluo, Ns. Irda Sahwida, S.Kep. Di bawah kepemimpinannya, gagasan menghadirkan rumah ibadah permanen di desa tersebut akhirnya terwujud setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan.

Sejak awal, rencana pembangunan masjid bukan perkara mudah. Tidak ada pos anggaran khusus yang tersedia untuk membiayai proyek tersebut. Pemerintah desa harus mencari cara agar cita-cita itu tetap berjalan tanpa membebani keuangan desa secara berlebihan. Dengan pendekatan persuasif dan semangat gotong royong, partisipasi masyarakat pun mulai terbangun.

Warga menyumbangkan tenaga, pikiran, dan rezeki sesuai kemampuan masing-masing. Tidak hanya masyarakat Lamoluo, sejumlah warga dari desa sekitar turut membantu. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap. Fondasi dicor, tiang-tiang berdiri, dinding mulai tersusun, hingga akhirnya atap terpasang dan bangunan dapat difungsikan.

“Ini bukan hanya tentang bangunan fisik. Ini tentang mimpi yang diwujudkan bersama oleh seluruh masyarakat,” ujar Irda Sahwida saat ditemui usai salat tarawih perdana di masjid tersebut. Senin (2/3)

Menurutnya, kehadiran masjid merupakan kebutuhan mendasar bagi desa yang terus bertumbuh. Selain sebagai tempat ibadah, masjid diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak, ruang musyawarah warga, serta wadah mempererat ukhuwah Islamiyah.

Sejak mekar hampir dua dekade lalu, Desa Lamoluo terus berbenah. Pergantian kepemimpinan menjadi bagian dari dinamika pembangunan desa. Setiap kepala desa memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam memajukan wilayah tersebut. Namun, tahun 2026 menjadi babak baru yang dinilai masyarakat sebagai lompatan penting dalam pembangunan spiritual desa.

Warga setempat, Ahmad (45), mengaku bangga dan terharu dapat merasakan Ramadhan di masjid desa sendiri. Selama ini, sebagian warga harus menempuh jarak ke desa lain untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid yang lebih representatif.

“Sekarang kami sudah punya masjid sendiri. Rasanya berbeda. Lebih dekat, lebih hangat, dan lebih terasa kebersamaannya,” katanya.

Ke depan, pemerintah desa bersama masyarakat berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan hingga tuntas, termasuk penyempurnaan interior dan fasilitas pendukung lainnya.

Masjid Jabal Nur kini berdiri bukan sekadar sebagai bangunan ibadah, tetapi simbol kebersamaan dan kemajuan Desa Lamoluo. Ia menjadi penanda bahwa desa tersebut tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga bertumbuh dalam nilai, spiritualitas, dan jati diri masyarakatnya.

Ramadhan 1447 Hijriah pun tercatat sebagai tonggak sejarah baru. Dari desa yang mekar dengan segala keterbatasan, Lamoluo kini menyalakan cahayanya sendiri—cahaya yang lahir dari persatuan, gotong royong, dan keyakinan bahwa mimpi besar dapat diwujudkan bersama.

Laporan: Aldi Dermawan

Dinkes Bombana Gelar Pisah Sambut Kepala Dinas, Momentum Perkuat Komitmen Layanan Kesehatan

Bombana, sultranet.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menggelar acara pisah sambut Kepala Dinas Kesehatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama sebagai bagian dari tradisi kelembagaan dalam menyambut

kepemimpinan baru sekaligus memberikan penghormatan kepada pejabat sebelumnya. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bombana. Acara berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana pada Minggu, 01 Maret 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat namun penuh kehangatan. Sejumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, serta tamu undangan lainnya turut hadir mengikuti rangkaian acara yang digelar dalam suasana Ramadhan tersebut.

Acarapisah sambut ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya, Darwin Ismail, SE, selama memimpin dan menjalankan berbagai program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bombana. Di saat yang sama, kegiatan ini juga menjadi momen untuk menyambut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan yang baru yang akan melanjutkan kepemimpinan di instansi tersebut.

Dalam sambutannya, Darwin Ismail menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya. Ia mengaku keberhasilan berbagai program kesehatan yang telah dijalankan tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras seluruh tenaga kesehatan di daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Bombana atas kebersamaan dan kerja sama yang luar biasa selama ini. Semua capaian yang kita raih merupakan hasil kerja kolektif. Saya berharap program-program kesehatan yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depan,” ujar Darwin.

Ia juga berpesan agar seluruh jajaran tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga di Kabupaten Bombana.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan yang baru menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama dalam masa kepemimpinannya.

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan dengan baik, sekaligus memperkuat berbagai inovasi pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik, cepat, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus memperkuat sinergi dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kesehatan tidak hanya bergantung pada kebijakan pimpinan semata, tetapi juga pada kerja sama, dedikasi, serta semangat kebersamaan dari seluruh tenaga kesehatan yang berada di dalam sistem pelayanan kesehatan.

Suasana kebersamaan semakin terasa ketika kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Momentum tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan di antara jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesinambungan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas program kesehatan sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga berharap seluruh tenaga kesehatan dapat terus menjaga semangat pengabdian serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, sejalan dengan tujuan utama pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan kepemimpinan yang terus berlanjut dan dukungan seluruh jajaran, sektor kesehatan di Kabupaten Bombana diharapkan mampu menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)

Pos Jaga Dibongkar Tim Pemkab Bombana, PT AABI Pertanyakan Dasar Hukum

BOMBANA, sultranet.com - PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI) mempertanyakan dasar hukum pembongkaran pos jaga security perusahaan yang dilakukan tim gabungan Pemerintah Kabupaten Bombana, Rabu (25/02/2026). Tindakan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana dan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.4.3.2-19 tentang pembentukan tim penertiban pertambangan ilegal.

Direktur Operasional PT AABI, Merry Febrianti Rumbayan, menyampaikan bahwa pos jaga yang dibongkar merupakan fasilitas pengamanan internal perusahaan yang sah dan bukan bagian dari aktivitas pertambangan ilegal sebagaimana dimaksud dalam SK tersebut.

“Jika dasar hukumnya adalah penertiban tambang ilegal, mengapa yang dibongkar justru fasilitas pengamanan perusahaan yang memiliki legalitas? Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami,” ujar Merry dalam keterangan tertulisnya.

Tim gabungan yang turun ke lokasi terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim ini dibentuk untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bombana.

Namun, menurut Merry, langkah pembongkaran tersebut tidak mencerminkan semangat penertiban yang tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa PT AABI bersama PT Panca Logam Makmur (PLM) berada dalam satu grup usaha dan beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pos jaga yang dibongkar, lanjutnya, memiliki fungsi penting dalam sistem pengamanan perusahaan. Selain menjaga aset dan fasilitas operasional, pos tersebut juga berperan dalam memastikan keselamatan para pekerja serta mendukung kelancaran aktivitas di lapangan.

“Pembongkaran secara paksa tentu berpotensi menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial. Kami sangat menyayangkan tindakan yang menurut kami tidak proporsional,” tegasnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korporasi dan kepastian berusaha, PT AABI menyatakan akan menempuh langkah hukum. Merry menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan dilaksanakan secara proporsional.

“Kami akan melakukan upaya hukum atas tindakan ini. Semua tindakan pemerintahan harus berdasar pada aturan yang jelas, proporsional, dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengawalan kegiatan tersebut agar memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan tidak melampaui kewenangan.

Merry menilai, apabila tujuan utama dari SK tersebut adalah menertibkan pertambangan ilegal, maka fokus penindakan seharusnya diarahkan pada aktivitas yang benar-benar tidak memiliki izin resmi.

“SK itu secara eksplisit berbicara tentang penertiban pertambangan ilegal. Maka wajar jika kami mempertanyakan mengapa fasilitas perusahaan yang sah justru menjadi objek pembongkaran,” tambahnya.

Meski menyampaikan keberatan, PT AABI tetap membuka ruang dialog dengan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mencari solusi terbaik. Perusahaan berharap polemik ini dapat diselesaikan secara bijak demi menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di daerah.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di Bombana, AABI mengaku memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, termasuk membuka lapangan kerja dan mendukung perputaran ekonomi lokal. Karena itu, pihaknya berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang berpotensi berdampak pada stabilitas usaha serta kesejahteraan pekerja.

“Kami percaya penyelesaian yang adil akan menjadi fondasi kuat bagi hubungan yang sehat antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Kepastian hukum adalah

nafas investasi," tutup Merry.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Pembongkaran dilakukan karena bangun pos milik perusahaan tidak memiliki IMB. Pihak Pemkab Bombana belum terkonfirmasi terkait kegiatan pembongkaran tersebut. (IS)